

**Analisis Pengembangan Potensi Desa Berbasis Indeks Membangun Desa (IDM)
(Studi Kasus: Desa Ponggok, Kecamatan Palohharjo, Kabupaten Klaten)**

Mohamad Sukarno

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
mohamadsukarno5@gmail.com

Abstract

The authority of the village government includes development, empowerment and public services. This authority then led the Ministry of Villages to issue a Village Ministry Regulation (Permedesa) No. 5 2015 related to the Development of Village Indicator (IDM) which is then used as a reference for each village. The purpose of this study was to determine the potential of IDM-based villages in Ponggok Village. The research method used was a qualitative method with a descriptive approach using secondary data sources. Sources of research data were in the form of articles, journals, and data related and relevant to the IDM variables and indicators. The results of the study found that Ponggok Village has been designated as a tourist village so that it affects the welfare of the surrounding community which has increased. One of the reasons behind this is the well-run management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) assets.

Keywords: Village Government, IDM, BUMdes

1. PENDAHULUAN

Pembangunan dan pengembangan potensi desa merupakan hal yang urgen (penting). Hal ini mengingat daerah perdesaan merupakan tempat tinggal mayoritas bagi masyarakat Indonesia. Dari data dalam Buku Indeks dan Data Wilayah Administratifaif dalam daerah Provinsi, daerah kabupaten atau kota, serta seluruh wilayah kecamatan di Indonesia menyebutkan bahwa total daerah perdesaan di Indonesia sebanyak 74.093 serta wilayah kelurahan sebanyak 8.412 (Setyowati, 2019).

Seiring perkembangannya sendiri daerah perdesaan tentu akan memiliki berbagai tantangan serta implikasi-implikasi sosial bagi masyarakat sekitar. Hal yang paling krusial adalah permasalahan kemiskinan dan jaminan bagi masyarakat desa yang kini masih meninggalkan permasalahan untuk selanjutnya dapat dicarikan penyelesaian masalah (*problem solving*). Sehingga penting bagi pemerintah desa dan berbagai instansi di dalamnya untuk dapat membangun serta meningkatkan potensi desanya demi mensejahterakan dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat desa. Pengalihan-pengalihan potensi desa dan pengembangan desa dapat dilakukan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta merujuk pada instruksi Kementerian Desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM).

Konsep IDM sendiri kemudian dijelaskan dalam Peraturan Kementerian Desa (Permendes) No. 2 Tahun 2016 tentang pola dan peta pengembangan pembangunan desa. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa konsep IDM terintegrasi dari beberapa kategori di dalamnya yang meliputi: Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Dari ketiga faktor tersebut kemudian dijadikan sebagai referensi dalam proses pengukuran strata kemandirian dan kemajuan suatu desa.

Dalam regulasi desa sendiri UU No. 6 Tahun 2014 juga telah memberikan sebuah stimulus dan mendukung percepatan agenda pembangunan desa (STIT et al., 2018). Hal yang menjadi titik fokus utamanya adalah masyarakat desa sebagai subjek pertama dan yang mendapatkan suatu perhatian akan adanya kemandirian masyarakat desa. Sehingga dari proses

pembentukan masyarakat desa yang mandiri tersebutlah diharapkan akan memberikan implikasi-implikasi yang positif bagi masyarakat desa dan dapat meningkatkan indeks pembangunan desanya.

Dalam rangka percepatan pembangunan dari daerah yang teralienasi, pemerintah Indonesia melaksanakan tugas dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengatur dan mengalokasikan dana desa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2015, total dana desa adalah 20,8 triliun rupiah, 46,8 triliun rupiah pada 2016, 60 triliun rupiah pada 2017, 111 triliun rupiah pada 2018, dan 113 triliun rupiah pada 2019. Dengan kucuran dana bergengsi ini, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Imigrasi (Kemendes PDTT) berencana mengumumkan 2.000 desa mandiri pada akhir 2019 (Nur Arifah & Kusumastuti, 2019)..

Melalui rumusan Indeks Pembangunan Desa (IDM) yang tertuang dalam buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Melalui RPJMN ini, realisasi sasaran strategis utamanya adalah mengurangi jumlah desa tertinggal menjadi 5.000 desa pada tahun 2019 dan menambah jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Tujuan pembangunan ini perlu memperjelas desa dan status pembangunannya. Indeks desa konstruksi tidak hanya membantu untuk memahami status pembangunan setiap desa yang berkaitan erat dengan karakteristiknya, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan RPJMN 2015-2019.

Untuk mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri, masalah penting yang perlu diselesaikan adalah kemiskinan. Kemiskinan di sini selalu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah Indonesia. Ini terjadi karena pemerintah telah menyadari pentingnya menyelesaikan masalah kemiskinan. Kegagalan menyelesaikan masalah ini akan mengakibatkan munculnya berbagai masalah sosial, ekonomi dan politik di masyarakat. Menurut Mubyarto, upaya serius pemerintah tersebut terbukti pada tahun 1976-1996, dan angka kemiskinan Indonesia turun tajam dari 40% menjadi 11% (Bakti, 2018).

2. KAJIAN LITERATUR

A. Pengertian dan Tipologi Desa Membangun dan Indikator Desa

Indeks Desa Membangun merupakan konsep sarana dalam melakukan pembangunan dan pengembangan potensi desa yang kemudian tertuang dalam Buku RPJMN 2015-2019. Proyeksi visionernya adalah melakukan pengurangan adanya desa tertinggal sebanyak 5000 desa dan berupaya meningkatnya desa mandiri sebanyak 2000 desa. Selain berfokus pada pembangunan dan pengembangan desa, IDM juga menunjang adanya upaya terhadap peningkatan otonomi desa. Semangat otonomi desa yang tertuang dalam UU No. Tahun 2014 juga memberikan keleluasaan terhadap pemerintah desa dalam melakukan optimalisasi desanya yang kemudian merujuk pada pembangunan nasional.

Azas-azas yang menjadi dasar pengaturan Desa dalam UU Desa dikuatkan dengan penegasan tentang *Kewenangan Desa*. Kewenangan Desa itu sendiri dijelaskan meliputi kewenangan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Penguatan kekuasaan perangkat desa dapat memperkuat prinsip-prinsip yang menjadi dasar peraturan desa dalam UU Desa. Kewenangan desa sendiri dimaknai meliputi pengelolaan desa, penyelenggaraan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan kewenangan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa, hak atas asal usul, masyarakat dan adat istiadat. Dalam fokus kekuasaannya sendiri yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan daerah dalam skala desa, ada tiga hal yang menjadi indikator yaitu prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa akan memperkuat landasan otonomi desa. Dalam kerangka pemahaman ini, dikembangkan metode "Membangun Indeks Desa". IDM meyakini pentingnya inisiatif dan kekuatan masyarakat pedesaan dalam proses kemajuan dan pemberdayaan kehidupan pedesaan dengan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi (KEMENDES RI, 2015).

Dalam konteks tipologi desa, Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: “(i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri”. Dari kelima klasifikasi tersebut maka kini statrta desa sudah memiliki beberapa pembagian yang digunakan sebagai indikator atau parameter desa.

Tipologi pembagian Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dibagi ke beberapa hal seperti: “(1) desa sangat tertinggal: $< 0,491$; (2) desa tertinggal: $> 0,491$ dan $< 0,599$; (3) desa berkembang: $> 0,599$ dan $< 0,707$; (4) desa maju: $> 0,707$ dan $< 0,815$; dan (5) desa mandiri: $> 0,815$ ” (Suroso, 2019). Tipologi tersebut sejalan dengan Permendes No. 6 Tahun 2016 yang mengatur peta pembangunan desa.

Pertama adalah desa sangat tertinggal atau desa tertinggal. Karakteristik desa ini memiliki beberapa konsep dalam pembangunannya seperti: pertama pengembangan, pengadaan, dan pemeliharaan dan kedua pengembangan sarana pembangunan terhadap aktivitas perekonomian dalam rangka mengadakan kegiatan baik itu produksi, distribusi, dan pemasaran. Selain itu untuk mendukung pengelolaan perekonomian desa pembentukan usaha ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui pengelolaan BUMDes sebagai aset yang dimiliki oleh desa.

Kedua adalah desa berkembang yang memiliki beberapa karakteristik meliputi: pembangunan serta pengembangan seluruh infrastruktur perekonomian mulai dari produksi, retribusi, dan pemasaran serta berusaha untuk dapat menjadi lumbu pangan dan usaha perekonomian masyarakat desa. Dalam hal pemeliharaan infrastruktur desa desa berkembang berusaha untuk melakukan pengadaan srana dan prasarana yang dimiliki oleh desa hingga dapat melakukan pelayanan terhadap masyarakat desa. Untuk mendorong hal tersebut penguatan erkonomian desa didukung oleh BUMDes sebagai akses perekonomian mulai dari pemberian modal, pengelolaan usaha, proses distribusi, dan terakhir proses pemasaran yang kesemuanya dipandu oleh pemerintah desa dalam rangka membantu perekonomian dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM.

Ketika adalah desa maju atau desa mandiri yang dicirikan sebagai sebuah desa yang memiliki baik itu pembangunan, pengembangan serta pemeliharaann infrastrktur desa yang berbasis pada angka produktifitas yang difokuskan dalam sebuah produk unggulan. Proses pemberdayaan dan pemeliharaan infrastruktur didukung atas proses pelayanan masyarakat yang prima dengan dukungan ketahanan pangan bagi masyarakat desa. Pengelolaan aset desa didukung oleh produktifitas dari BUMDes yang berusaha untuk dapat melakukan suatu produksi, retribusi, dan pemasaran yang baik dan didukung oleh kualitas masyarakat desa dengan tujuan sebagai mata pencarian dan pengaktifan perekonomian masyarakat sekitar.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan untuk menggambarkan sifat yang tepat dari gejala atau tanda-tanda selanjutnya perkembangan hubungan antara objek penelitian dengan fenomena sosial lainnya dalam data diperoleh dengan kajian pustaka, melalui dokumen-dokumen resmi yang mencatat keadaan yang terjadi dalam suatu objek penelitian, berupa majalah, hasil-hasil studi, tesis, maupun hasil survei dari berbagai instansi pemerintah maupun tidak ((Novriando & Purnomo, 2020).

Studi kasus dalam pendekatan ini diadopsi dari Teorinya Sugiyono (2009 yang mengatakan bahwa studi dokumentasi merupakan salah stu metode kualitatif dengan menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. Studi dokumentasi sendiri merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti kualitattif dalam hal untuk memperoleh sudut pandang atau gambaran dari objek yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian di dalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek

penelitian. Sumber data dapat berasal dari dokumen dokumentasi dari website Desa Ponggok maupun hasil penelitian-penelitian terdahulu. Dalam hal analisis data penulis menggunakan analisis naratif untuk menggambarkan sebuah fenomena dan membedah mengenai inovasi yang dilakukan oleh Desa Ponggok dalam melaksanakan pembangunan berbasis IDM.

4. HASIL PENELITIAN

1. Indikator Desa Membangun

Dalam indikator desa membangun setidaknya ada tiga dimensi yang dijelaskan di dalam Buku Indeks Desa Membangun Kemendes. Berikut penulis sampaikan ketiga dimensi dalam indikator desa membangun

No.	Dimensi	Variabel
1.	Ketahanan Sosial	Modal Sosial
		Kesehatan
		Pendidikan
2.	Ketahanan Ekologi	Pemukiman
		Kualitas lingkungan
		Potensi rawan bencana
		Tanggap bencana
3.	Ketahanan Ekonomi	Keragaman produksi masyarakat desa
		Tersedianya Pusat perdagangan
		Akses distribusi dan logistic
		Akses ke lembaga keuangan
		Lembaga Ekonomi
		Keterbukaan wilayah

Untuk Desa Ponggok sendiri indikator Desa Membangun yang menjadi hal pokok utamanya adalah pengelolaan aset desa yang dikelola oleh BUMDes sendiri. Dalam BUMDes tersebut seluruh kegiatan perekonomian masyarakat serta yang paling utama peningkatan potensi alam desa menjadi hal yang mendominasi. Desa Ponggok sendiri dalam meningkatkan parameter kualitas desanya dilakukan melalui dua dimensi yakni fokus pada ketahanan sosial dan fokus pada ketahanan ekonomi. Peranan BUMDes “Tirta Mandiri” dalam mengelola potensi desa baik alam maupun dari segi perekonomian telah mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Desa Ponggok sendiri.

2. Analisis Desa Membangun dan Kendalanya

a. Pembangunan dan pengembangan potensi desa berbasis BUMDes

Desa Ponggok secara historisnya sendiri membentuk suatu badan usaha yang dikelola penuh oleh pemerintah desa pada 15 Desember 2009. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapat meningkatkan parameter kemakmuran masyarakat desa yang sekaligus memiliki sebuah payung hukum. BUMDes Tirta Mandiri sendiri merupakan sebuah badan usaha yang mengelola beberapa aset baik itu yang berasal dari alam ataupun berasal dari kegiatan hasil perekonomian masyarakat (Zakiyah & Idrus, 2017).

Badan Usaha Milik Desa Ponggok sendiri memiliki beberapa kegiatan di dalamnya yakni: “a). PAM air bersih, b). Kegiatan Perikanan (penyediaan benih, pakan dan ikan konsumsi), c). Kegiatan Pertanian (pupuk dan saprodi), d). Kegiatan Pariwisata dan Gastronomi, e). Kegiatan Pengadaan Barang, f). Kegiatan Simpan Pinjam, g). Kegiatan Perdagangan” (Zakiyah & Idrus, 2017).



Gambar: Toko BUMDes Ponggok

Kegiatan yang di kelola oleh BUMDes “Tirta Mandiri” dalam beberapa bidang kemudian untuk mempermudah pengelolaannya, kemudian dibentuklah badan hukum untuk masing – masing bidang usaha dalam bentuk Perseoran Terbatas (PT) supaya dapat menjalankan aktifitasnya, layaknya sebuah BUMN yang professional, diantaranya:

- “1). PT. Umbul Ponggok (pengelolaan destinasi pariwisata umbul ponggok), 2). PT. Sumber Panguripan (Pengelolaan Toko Desa), 3). PT. Ponggok Ciblon (Pengelolaan Destinasi Wisata Kawasan Ponggok Ciblon), 4). PT. Banyu Panguripan (Pengelolaan Gedung Desa Ponggok), 5).PT. Artha Tirta Ponggok (Pengelolaan Perkreditan Rakyat), 6). PT.Bangun Tirta Jaya (Jasa Konstruksi), 7). PT.Air Ponggok (Pengelolaan air bersih dan air dalam kemasan), 8).PT. Mirna Tirta Mulia (Pengelolaan kolam dan perikanan)” (Putra, 2018).

Peranan BUMDes dalam mereformasi parameter perekonomian masyarakat menjadi hal yang sangat substansial dan fundamental. BUMDes Tirta Mandiri memiliki beberapa mitra kerja sama guna mendorong mencapai kesuksesan tujuan dari pengelolaan aset maupun desa berbasis BUMDes. Berikut adalah data mitra dari BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok:

No.	Jenis Usaha	Keterangan
1.	Kuliner	Adanya pembangunan kios kuliner yang dilakukan oleh BUMDes Ponggok yang kemudian dapat disewakan kepada seluruh warga Ponggok. Pembangunannya dilakukan dalam dua tempat strategis yakni di wilayah Umbul Ponggok dan komplek Ponggok Ciblon
2.	Wisata Umbul	Kolam air alami yang digunakan dan dikembangkan sebagai wisata air
3.	Toko Desa	Tempat pemasukan bagi warga Ponggok dengan nama “Sumber Panguripan”. Toko ini juga memberikan pelayanan bagi warga terutama bagi masyarakat yang mempunyai UMKM sendiri

Sumber: (Zakiah, 2017)

Dalam melakukan atau merealisasikan BUMDes Pemerintah Ponggok juga berupaya melibatkan seluruh partisipasi masyarakat terutama pemuda desa. Dikuti dari penelitian Kasila & Kolopaking (2018) menyebutkan bahwa partisipasi warga dari

mulai tahapan pengumpulan keputusan, tahapan pelaksanaan, tahapan menikamati, dan tahapan evaluasi semua antusias berpartisipasi secara baik dengan berbagai latar belakang individu yang berbeda (usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lainnya).

Selain peranan pengelolaan aset penulis ingin menyajikan beberapa karakteristik para pelaku usaha yang meliputi umur, latar belakang, lamanya bekerja, dan pendapatan pelaku usaha yang dikutiip dari Skripsi Rieza Yudhitama (2018) tentang “Pengaruh *Viral Umbul Ponggok Terhadap Kebeadaan Pelaku Usaha Di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Tahun 2018*). Berikut penulis sajikan karakteristik pelaku usaha dan pendapatan (*income*) dari pelaku usaha sebagai berikut:

1. Umur

Umur merupakan salah satu hal terpenting dalam mengukur tingkat pengalaman ataupun kemampuan seseorang, berikut adalah tabel data frekuensinya:

No	Variabel	Frekuensi	Presentase
1.	<15	0	0
2.	15-29	28	46.666.667
3.	30-39	20	33.3
4.	40-49	7	11.7
5.	>50	5	8.3
	Jumlah	60	100

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal parameter lain yang menunjang dalam pengetahuan (*knowledge*) seseorang dalam mengeluti bidangnya. Berikut adalah data frekuensi pendidikannya:

Variabel	Frekuensi	Presentase
Tidak sekolah	0	0
Tidak tamat SD	0	0
SD Tamat	4	6.7
SLTP tidak tamat	0	0
SLTP tamat	17	28.3
SLTA tamat	20	48.3
SLTA tidak tamat	0	0
PT tidak tamat	0	0
PT tamat	10	16.7
Jumlah	60	100

3. Rentang dan waktu lamanya usaha

Ada beberapa peningkatan setiap tahunnya dalam rentang serta lamanya usaha warga Ponggok. Berikut data tabel frekuensinya:

Variabel	Frekuensi	
	jiwa	Presentse
3 bulan	3	5
6 bulan	1	1.7

1 tahun	2	3.3
2 tahun	11	18.3
3 tahun	13	21.7
4 tahun	8	13.3
5 tahun	13	21.7
>5 tahun	9	15
Jumlah	60	100

4. Pendapatan para pelaku usaha

Pendapatan merupakan hal utama yang menunjang dalam hal peningkatan parameter perkonomian warga Desa Ponggok. Perkembangan pendapan bagi pelaku usaha selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan berbagai faktor yang mendukung dalam kegiatan tersebut. Berikut penulis sajikan tabel data frekuensi terkait dengan besara pendapatab bagi pelaku usaha:

Sebelum Viral	Tahun	Tiket masuk	Pendapatan pertahun
	2010	Rp. 5.000	5 juta
Awal viral	2011	Rp. 10.000	100 juta
	2012	Rp. 15.000	
Mulai viral	2013	Rp. 15.000	600-700 juta
	2014	Rp. 15.000	
	2015	Rp. 15.000	
Viral	2016	Rp. 15.000	Miliar
	2017	Rp. 15.000	

b. Implikasi dari Eksistensi BUMDes Tirta Mandiri bagi kehidupan masyarakat Ponggok

Perkembangan yang sangat masif dari eksistensi BUMDes Ponggok tentunya akan membawa keberkahan ataupun kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Pengelolaan dan pengembangan potensi desa berbasis mandiri akan sangat berimplikasi bagi peningkatan perekonomian masyarakat sekitar serta dapat menjadi sarana investasi pembangunan bagi masyarakat sendiri.

Dikutip dari penelitian Parantika (2020) tentang "Pengaruh Status Desa Wisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Ponggok" menyebutkan ada beberapa implikasi yang dirasakan masyarakat sekitar seperti: keberadaan tempat wisata di Ponggok terbukti telah membantu warga dalam mengagas ketrampilan dan kreativitas usaha mereka buka. Hal pertama adalah mulai dari rincian harga tiket masuk sebesar Rp. 15.000, kemudian ada beberapa tambahan seperti misalnya rincian biaya untuk alat-alat snorkling sebesar Rp. 5000- 7000 ataupun penyewaan kamera dengan tarif seharga Rp. 60.000- 100.000 per jamnya.

Dalam hal pengelolaan aset BUMDes sendiri, warga Desa Ponggok telah melakukan investasi sebesar 76% per keluarga ke BUMDes Tirta Mandiri. Nilai investasi yang diperoleh per keluarga adalah sebesar Rp. 400.000-500.000 per bulannya dengan total investasi sebanyak 5 juta pada setiap keluarga. Sehingga hal tersebut berimplikasi pada pendapatan (*income*) yang berkisar antara Rp. 1.500.000-2000.000.

Selain itu, budaya kehidupan masyarakat Desa Ponggok juga mengalami beberapa mobilisasi (pergeseran). Misalnya sebelum adanya desa wisata di Ponggok dahulu rata-rata mata pencarian masyarakat adalah sebagai petani dan kini beralih menjadi

pedagang maupun sebagai penyedia layanan jasa. Banyaknya wisatawan yang masuk yang salah satunya dari mancanegara juga membuat warga sekitar untuk dapat mengasah kemampuan berkomunikasi dalam menunjukkan wisata yang ada di Ponggok maupun memperkenalkan budaya lokal Ponggok ke wisatawan luar tersebut.

c. Kendala yang dihadapi Desa Ponggok melakukan IDM

Dari beberapa literatur yang diidentifikasi hingga penulis menemukan hal kendala yang dihadapi Desa Ponggok dalam rangka mensukseskan BUMDes adalah tingkat partisipasi warga yang masih dikategorikan sedang (Kasila & Kolopaking, 2018). Hal utama yang menjadi faktor penyebabnya adalah berkaitan dengan pengetahuan (*knowledge*) maupun pengalaman secara personal (*individu*).

5. SIMPULAN

Dari kajian dan analisis yang sudah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwasanya Desa Ponggok yang ditetapkan sebagai desa wisata. Kemudian statusnya sebagai desa wisata tersebut kini telah berubah menjadi desa mandiri. Hal ini mengingat perubahan pola kehidupan masyarakat baik dari segi sosial maupun dari segi perekonomian. Selain itu Desa Ponggok sendiri memiliki tingkat pendapatan yang sangat besar berkat kesuksesannya dalam mengelola aset desa melalui BUMDes Tirta Mandiri

6. REFERENSI

- Bakti, H. S. (2018). Identifikasi Masalah Dan Potensi Desa Berbasis Indek Desa Membangun (Idm) Di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.30741/wiga.v7i1.331>
- Dholym, S. F. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Umbul Ponggok, Desa Ponggok, Polanharjo, Klaten.
- Kasila, M., & Kolopaking, L. M. (2018). Participation of Rural Youth in Business Development of BUMDes “Tirta Mandiri.” *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.1.43-58>
- KEMENDES RI. (2015). *Indeks Desa Membangun (IDM)*. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. <https://idm.kemendes.go.id/>
- Novriando, A., & Purnomo, E. P. (2020). Penetrasi Digital Untuk Pembangunan Berkelanjutan: Keberhasilan Pelayanan E-Government Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora maniora*, 4(2), 97. <https://doi.org/10.31604/jim.v4i2.2020.97-108>
- Nur Arifah, M., & Kusumastuti, N. (2019). Strategi Mempercepat Pembangunan Desa Mandiri: Studi Di Desa Kemadang Gunungkidul. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 2(1), 169–188. <https://doi.org/10.14421/jpm.2018.021-09>
- Parantika, A. (2020). PENGARUH STATUS DESA WISATA TERHADAP KEHIDUPAN. *Community Development Journal*, 1(2), 176–180.
- Putra, A. S. (2018). Diskursus Pengakuan, Badan Hukum, Dan Fenomena Badan Usaha Milik Desa “Tirta Mandiri” Di Desa Ponggok. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(3), 465. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i3.260>
- Setyowati, E. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang. *Jispo*, 9(2), 170–188.
- STIT, M., Kusuma, N., & Purwanti, E. (2018). Village Index Analysis Building to Know The Village Development In Gadingrejo District of Pringsewu District. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbang*, 6(02), 179–190. <https://doi.org/10.35450/jip.v6i02.96>
- Suroso, S. (2019). Eksistensi Pembangunan Masyarakat Dan Desa Di Kawasan Perkotaan Kabupaten Pati. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 15(2), 77–90. <https://doi.org/10.33658/jl.v15i2.140>

- Yudhitama, R. (2018). PENGARUH VIRAL UMBUL PONGGOK TERHADAP KEBERADAAN PELAKU USAHA DI DESA PONGGOK KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018. In *Skripsi* (Vol. 10, Issue 2).
- Zakiah, U., & Idrus, I. A. (2017). Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Ponggok. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 2(2), 84–95. <https://doi.org/10.24905/jip.2.2.2017.84-95>